

Pengaruh *Political Connection*, *Earning Management*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi

Mikha Btari Batubara, Hexana Sri Lastanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

mikhabtari8@gmail.com , hexana.sri@trisakti.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and find empirical evidence regarding the effect of political connection, earning management on tax avoidance moderated by corporate governance. This study uses secondary data with data collection techniques using the annual reports of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018-2022. This study used purposive sampling technique with a total sample of 100 from 20 companies. Data testing in this study used multiple linear regression analysis with panel data. Tax avoidance in this study is proxied by Book Tax Difference. The results showed that political connection and CSR variables have a positive effect on tax avoidance, earning management has a negative effect on tax avoidance, and corporate governance proxied by independent commissioners does not strengthen or weaken the relationship between political connection, earning management, and CSR on tax avoidance.

Keywords: *tax avoidance; political connection, eaning management, corporate social responsibility, corporate governance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *political connection*, *earning management* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total sampel 100 dari 20 perusahaan. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan data panel. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diproksikan dengan *Book Tax Difference*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *political connection* dan CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *earning management* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara *political connection*, *earning management*, dan CSR terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *tax avoidance; political connection, eaning management, corporate social responsibility, corporate governance*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting bagi penerimaan negara ialah pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang

dibayarkan kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan dan memiliki sifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang digunakan demi kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pemungutan pajak sebagai penerimaan negara telah dilakukan sejak tahun 3300 sebelum masehi (SM) di Mesopotamia. Selain di Mesopotamia, pemungutan pajak juga dilakukan di Mesir sekitar tahun 3000 SM. Tahun 31 SM – 746 M Kekaisaran Romawi juga melakukan pemungutan pajak yang intensif sehingga membuat Kekaisaran Romawi sebagai kekaisaran terbesar di dunia dan menjadi kekaisaran yang sangat makmur. Di Indonesia pemungutan pajak mulai terjadi ketika kerajaan di Nusantara memungut upeti yang mana menjadi salah satu sumber pemasukan kerajaan termasuk untuk melindungi rakyatnya. Pada masa kolonial, pemerintah mengenakan pajak yang memberatkan rakyat dan mengenakan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan status kewarganegaraan. Namun, memasuki masa kemerdekaan, pemungutan pajak telah dimasukkan ke dalam UUD 1945 yang telah diamendemen yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan, Pemerintah Indonesia dan DPR membuat undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Oleh karena itu, pemungutan pajak di Indonesia telah sesuai dengan Amanah konstitusi dan undang-undang sehingga orang pribadi atau perusahaan yang memenuhi persyaratan wajib menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibanding dengan negara lain termasuk di ASEAN. Hal tersebut dapat dilihat melalui *tax ratio* Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,33 persen sementara tahun 2021 sebesar 9,11 persen. *Tax ratio* negara-negara di ASEAN sebagian besar di atas 12 persen. Sementara untuk negara maju yakni Eropa Barat *tax ratio*-nya mencapai 41 persen di tahun 2020. Nilai *tax ratio* yang tinggi menandakan negara tersebut mempunyai sumber pendanaan yang memadai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari sumber lain seperti hutang. Selain itu *tax ratio* yang tinggi menggambarkan kontribusi rakyat yang tinggi dalam pembangunan melalui ketaatan pembayaran pajak (DJKN Kemenkeu, 2022).

Tax Justice Network menyatakan dalam laporannya pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan rugi sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun berasal dari praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dalam praktik *tax avoidance*, perusahaan mengalihkan pendapatannya ke negara yang bebas atau rendah tarif pajaknya dengan tujuan tidak akan melaporkan keuntungan yang sesungguhnya yang berarti perusahaan tersebut akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (Kompas.com, 2020). Kementerian Keuangan mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan dengan yang melapor. Pada 2015 dari total 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP

yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini belum termasuk pemain (perusahaan) batu bara skala kecil yang tidak meregistrasi sebagai WP (katadata.co.id).

Di Indonesia kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan salah satunya ialah kasus penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energy. PT. Adaro Energy melakukan *transfer pricing* dengan menjual batu bara yang dihasilkan dengan harga yang lebih murah kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yakni Coaltrade Service International Ltd yang bertempat di Singapura. Semua ini telah dilakukan Adaro dari tahun 2009-2017. Adaro telah mengatur skema agar jumlah pajak yang dibayarkan hanya sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Detikfinance, 2019).

Penelitian-penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *political connection* dan *earning management* terhadap *tax avoidance* selalu menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak pasti. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, *corporate governance* ditempatkan sebagai variabel moderasi karena diduga dapat memperkuat pengaruh *political connection* dan *earning management* terhadap *tax avoidance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh *political connection* dan *earning management* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan yang jelas dan tegas yang dapat menutup celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data sekunder dan diambil dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan selama 5 tahun yaitu tahun 2018 - 2022. Adapun penentuan sampel penelitian dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018; 2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap pada periode tahun 2018 – 2020; 3) Perusahaan tersebut tidak dalam kondisi *suspended* atau *delisting* selama tahun 2018 – 2022; 4) Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Jumlah perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 20 dengan 5 tahun pengamatan sehingga total sampel yang digunakan adalah 100.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen *tax avoidance*, dan variabel independen yang terdiri dari *political connection*, *earning management*, dan *corporate social responsibility*. Penelitian ini juga menggunakan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran
Tax Avoidance (BTD)	Pengaturan transaksi untuk mendapatkan pengurangan pajak (Brown, 2012).	$BTD = \frac{(Laba Akuntansi - Penghasilan Kena Pajak)}{Total Asset}$ (Frank et al., 2009 dalam Prismanitra & Sukirman, 2021)
Political Connection	Kondisi di mana terdapat suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017).	Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik jika salah satu pemilik, dewan direksi, atau dewan komisarisnya adalah pejabat atau mantan pejabat di pemerintahan dan militer dan berafiliasi dengan partai politik. Dalam menentukan perusahaan mempunyai koneksi politik digunakan skala nominal, yaitu diberikan nilai 1 apabila memiliki koneksi politik dan diberikan nilai 0 apabila tidak memiliki koneksi politik (Butje & Tjondro, 2014 dalam Putra & Suhardianto, 2020).
Earnings Management	Kegiatan penilaian serta penyusunan transaksi tertentu dalam rangka mengubah laporan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu (Sulistiyanto, 2008).	Discretionary accruals (Model John Modified) (Amidu et al., 2017 dalam Prismanitra & Sukirman, 2021) $\frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} = \alpha_1 \frac{1}{A_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{SI_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \alpha_3 \frac{\Delta SI_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \epsilon_{i,t}$ $NDA_{i,t} = \alpha_1 \frac{1}{A_{i,t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_{i,t} - \Delta REC_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_{i,t}}{A_{i,t-1}} + \epsilon_{i,t}$ $DA_{i,t} = \frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$
Corporate Responsibility Disclosure (CSRD)	Komitmen perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan (Solihin, 2015).	$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n}$ (Zeng, 2018 dalam Prismanitra & Sukirman, 2021) GRI 4 (91 item)
Corporate Governance (Komisaris Independen)	Pihak Independen yang melakukan fungsi pengawasan terhadap kewajiban Direksi (Naja, 2007).	$DKI = \frac{Komisaris Independen}{Jml Komisaris Perusahaan}$ (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55 /POJK.03/2016)
Firm Size	Total aset yang dimiliki perusahaan, total aset dapat digunakan untuk kegiatan operasi Perusahaan (Dewi & Wirajaya, 2013).	$Firm Size = Ln (Total Asset)$ (Richardson dan Lanis, 2007).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews12. Ada beberapa tahap untuk melakukan analisis data yaitu Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji koefisien determinasi *adjusted R-Square* dan Uji t. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh *Political Connection*, *Earning Management*, dan CSR terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* Sebagai Pemoderasi. Adapun model pengujian analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + C + e$$

Keterangan:

Y	: <i>Tax Avoidance</i>
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien Regresi
X1	: <i>Political Connection</i>
X2	: <i>Earning Management</i>
X3	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Z	: <i>Corporate Governance</i>
C	: <i>Firm Size</i>
e	: <i>error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif adalah *Political Connection* (X1), *Earning Management* (X2), CSR (X3), *Firm Size* (C), *Corporate Governance* (Z), *Tax Avoidance* (Y). Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variable	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Political Connection (X1)	0	1	0.45	0.5
Earning Management (X2)	-0.125	0.414	0.096	0.11
CSR (X3)	0.264	0.961	0.372	0.097
Firm Size (C)	26.76	32.741	29.849	1.291
Corporate Governance (Z)	0.2	0.667	0.384	0.085
Tax Avoidance (Y)	-112.324	1943.267	26.136	213.204

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan Tabel 2, nilai minimum dari *Political Connection* (X1) adalah 0, dengan nilai maksimum 1. Rata-rata adalah 0.45, dengan standar deviasi 0.5. Nilai minimum dari *Earning Management* (X2) adalah -0.125, dengan nilai maksimum 0.414. Rata-rata adalah 0.096, dengan standar deviasi 0.11. Nilai minimum dari CSR (X3) adalah 0.264, dengan nilai maksimum 0.961. Rata-rata adalah 0.372, dengan standar deviasi 0.097. Nilai minimum dari *Firm Size* (C) adalah 26.76, dengan nilai maksimum 32.741. Rata-rata adalah 29.849, dengan standar deviasi 1.291. Nilai minimum dari *Corporate Governance* (Z) adalah 0.2, dengan nilai maksimum 0.667. Rata-rata adalah 0.384, dengan standar deviasi 0.085. Nilai minimum dari *Tax*

Avoidance (Y) adalah -112.324, dengan nilai maksimum 1943.267. Rata-rata adalah 26.136, dengan standar deviasi 213.204.

Hasil Pengujian Model

Penentuan Model Estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Uji Chow*

Tabel 3. Hasil *Uji Chow*

Effect Test	Prob.
Period Chi-Square	0.5091

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil dari uji Chow pada Tabel 3, diketahui nilai probabilitas adalah 0,5091. Karena nilai probabilitas $0,5091 > 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *common effect model* (CEM).

Penentuan Model Estimasi antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan *Uji Hausman*

Tabel 4. Hasil *Uji Hausman*

Test Summary	Prob.
Period Random	1.0000

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil dari uji Hausman pada Tabel 4, diketahui nilai probabilitas adalah 1,0000. Karena nilai probabilitas $1,0000 > 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *random effect model* (REM).

Penentuan Model Estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan *Uji Lagrange*

Tabel 5. Hasil *Uji Lagrange*

Prob. Chi Square	0.0648
------------------	--------

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan hasil dari uji Lagrange pada Tabel 5, diketahui nilai probabilitas adalah 0,0648. Karena nilai probabilitas $0,0648 > 0,05$, maka model estimasi yang digunakan adalah model *common effect model* (CEM).

Setelah dilakukan pengujian model maka didapatkan model akhir yang digunakan pada penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukan pengujian asumsi klasik adalah untuk memastikan data yang digunakan terdistribusi dengan normal dan memastikan model dalam regresi

yang digunakan tidak mengalami heterokedastisitas, autokorelasi serta multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik:

Tabel 6. Uji Asumsi Klasik

Variabel	VIF
Political Connection (X1)	1.366768
Earning Management (X2)	1.082347
CSR (X3)	1.593341
Firm Size (C)	1.661057
Jarque-Bera 0.733465	
Durbin-Watson 2.001404	
Prob. Chi-Square 0.4881	

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai probabilitas dari Jarque-Bera adalah 0,733465. Karena nilai probabilitas *p*, yakni 0,733465 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05, maka dapat disimpulkan data yang digunakan terdistribusi dengan normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel independen terbebas dari masalah multikolinieritas, hal ini dapat dilihat dari nilai VIF variabel kurang dari 10 (VIF < 10). Hasil uji Breusch-Pagan pada tabel di atas diketahui nilai Prob. Chi-Square 0,4881 > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 2,001404. Karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, yakni 1 < 2,001404 < 3, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Tabel 7. Uji t

Variabel	Coefficient	Kesimpulan	
C	48.93347		
X1	-2.164009	Berpengaruh (Diterima)	negatif
X2	-168.9633	Berpengaruh (Ditolak)	negatif
X3	118.4294	Berpengaruh (Diterima)	positif
Kontrol	-2.492795		
Adjusted R-squared	0.2010		
Prob. (F-statistic)	0.000040		

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Dari tabel di atas diketahui nilai adjusted R square sebesar 0.2010, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen *political connection*, *earning management*,

dan CSR memiliki kontribusi atau pengaruh sebesar 20.10% terhadap praktik *tax avoidance* sedangkan sisanya sebesar 79.90 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tabel di atas menunjukkan nilai *Prob. (F-statistics)*, yakni $0,000040 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu *political connection*, *earning management* dan CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Pengujian Moderasi

Tabel 8. Pengujian Moderasi

Variabel	Prob.	Kesimpulan
X1Z	0.2647	Tidak signifikan (Ditolak)
X2Z	0.1614	Tidak signifikan (Ditolak)
X3Z	0.2117	Tidak signifikan (Ditolak)
KontrolZ	0.2352	

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Pengaruh *Political Connection (X1)* dengan *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai koefisien regresi koneksi politik sebesar -2.164009 dengan tingkat signifikansi 0.8301 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0.8301 > 0,05$) dengan demikian koneksi politik memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif namun tidak signifikan yang berarti H1 diterima. Nilai koefisien tersebut mengindikasikan hubungan negatif antara koneksi politik dengan penghindaran pajak yang diproses dengan BTD. Sehingga semakin tinggi koneksi politik maka akan semakin rendah nilai BTD yang mengartikan semakin tinggi koneksi politik pada perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan interpretasi BTD yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asdanie & Venusita (2020) yang menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan juga dimanfaatkan dengan adanya lobi-lobi yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun untuk memperkecil *punishment* apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap karena melanggar aturan perpajakan.

Pengaruh *Earning Management (X2)* dengan *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai koefisien regresi *earning management* sebesar -168.9633 dengan tingkat signifikansi, $0.0001 < 0.05$. Dengan demikian *earning management* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif yang berarti H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan melakukan kegiatan manajemen laba bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah

untuk kepentingan antar orang-orang yang berkepentingan di dalam organisasi yang telah dijelaskan dalam Teori Agensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati & Yuliansari (2019) yang menyatakan *earning management* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan melakukan kegiatan manajemen laba bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah perusahaan telah memiliki pajak tangguhan pada tahun sebelumnya sehingga pajak perusahaan akan tetap terlihat tinggi meskipun melakukan *income decreasing*, selain itu tidak dipisahkannya beban pajak perusahaan yang bersifat final dan beban pajak selain pajak badan dengan beban pajak badan di dalam laporan keuangan sehingga menyebabkan beban pajak akan tetap terlihat besar meskipun perusahaan melakukan *income decreasing*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (X3) dengan *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai koefisien regresi CSR sebesar 118.4294 dengan tingkat signifikansi $0.0378 < 0.05$. Dengan demikian CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah positif yang berarti H3 diterima.

Corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan memanfaatkan CSR sebagai tempat pengalokasian beban pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah, sejalan dengan teori akuntansi positif terkait hipotesis biaya politik di mana perusahaan cenderung memilih akuntansi untuk menurunkan laporan labanya dengan mengalokasikannya pada pemberian CSR kepada masyarakat. Kemiripan pajak dan CSR dalam hal pemberian kontribusi sosial kepada masyarakat memberikan pandangan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui aktivitas CSR yang tinggi (Muljadi et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pramitha & Susianti (2023) di mana terdapat sinyal bahwa beberapa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kegiatan CSR semata-mata hanya dalam rangka mendapatkan citra positif agar dapat menutupi tindakan tidak bertanggung jawab seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh *Political Connection* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai Moderasi

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai probabilitas *political connection* dengan *corporate governance* yang diprosikan dengan komisar independen sebesar 0.2647 (> 0.05) yang mana menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan, H4 ditolak. Hal ini berarti banyaknya kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak akan memengaruhi hubungan koneksi politik dengan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan karena kepemilikan institusional menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh institusi. Institusi seperti pemegang saham lainnya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan operasional

perusahaan sama dengan pemegang saham lainnya, pemegang saham institusional juga menginginkan bonus dari hasil kinerja perusahaan. Sehingga hal ini memungkinkan keberadaan pihak institusional cenderung tidak memperhatikan kebijakan perencanaan pajak perusahaan tetapi lebih fokus pada bonus dari laba perusahaan yang menyebabkan motif yang dilakukan cenderung pada manajemen laba, bukan pada Agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai Moderasi

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai probabilitas *earning management* dengan *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen sebesar 0.1614 (> 0.05) yang mana menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan, H_5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berhasil untuk memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Feryansyah et. al (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan *earning management* dengan *tax avoidance*. GCG tidak memperlemah atau memperkuat hubungan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme GCG yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan Tindakan-tindakan pihak oportunistis seperti manajemen laba dan agresivitas pajak tidak berjalan secara efektif. Akibat lainnya prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran belum terpenuhi dalam menjalankan mekanisme GCG.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai Moderasi

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai probabilitas CSR dengan *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen sebesar 0.2117 (> 0.05) yang mana menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan signifikan, H_6 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berhasil untuk memoderasi pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramita & Susianti (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak dapat memperlemah atau memperkuat hubungan CSR dengan *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*; (2) *earning management* berpengaruh negatif terhadap *tax*

avoidance; (3) CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*; (4) *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *political connection* dengan *tax avoidance*; (5) *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *earning management* dengan *tax avoidance*; (6) *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara CSR dengan *tax avoidance*

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Does political connection, executive character, and audit quality affect the tax avoidance practice? Evidence in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 377.
- Ardillah, K., & Halim, Y. (2022). The effect of institutional ownership, fiscal loss compensation, and accounting conservatism on tax avoidance. *Journal of Accounting, Auditing, and Business*, 5(1), 1-15.
- Ardillah, K., & Vanesa, Y. (2022). Effect of corporate governance structures, political connections, and transfer pricing on tax aggressiveness. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 6(1), 51-72.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4, 1-9.
- Detik.com. (2019, July 5). Mengenal soal penghindaran pajak yang dituduhkan ke Adaro. Retrieved March 29, 2023, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. G. K. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Ekonomi.bisnis.com. (2021, August 2). Mayoritas perusahaan tambang belum transparan soal pajak. Retrieved March 8, 2023, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Garriga, E., & Melé, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. *Journal of Business Ethics*, 53(1-2), 51-71.

- Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hanny, R. Y., & Niandari, N. (2018). Tax avoidance practice: Political connection, firm characteristics and audit quality test at banking industrial in Indonesia. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*, 9, 1296-1303.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Katadata.co.id. (2019, February 11). Gelombang penghindaran pajak dalam pusaran batu bara. Retrieved March 10, 2023, from <https://katadata.co.id/yuliawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaranpajak-dalam-pusaran-batu-bar>
- Kemenkeu.go.id. (2022, April 20). Pajak untuk pembangunan nasional. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajakuntuk-Pembangunan-Nasional.htm>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012*.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- KNKG, K. N. K. G. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*.
- Kompas.com. (2020, November 23). RI diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka-dari-internet/>
- Nurlis, Indriawati, F., & Ariani, M. (2021). Effect of earning management and corporate social responsibility disclosure on tax avoidance with firm size as a moderating variable: Survey on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(2021).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Pramaswaradana, K., & Astika, I. B. P. (2017). Pengaruh audit tenure, audit fee, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi pada kualitas audit. *E-Jurnal Akuntansi*, 19, 168-194.
- Pramita, Y. D., & Susianti, E. N. (2023). Pengaruh transfer pricing, koneksi politik, thin capitalization, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap tax

avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2).

Prismanitra, K., & Sukirman. (2021). The determinants of tax avoidance with good corporate governance as a moderating variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101-107.

Purbowati, R., & Yuliansari, S. (2019). Pengaruh manajemen laba dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 2(2), 143-155.

Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The influence of political connection on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 82-90.

Sadjiarto, A., Ringoman, J. A., & Angela, L. (2024). The effects of earning management and environmental, social, governance (ESG) on tax avoidance with leverage as a moderating variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 63-74.

Schipper, K. (1989). Commentary on earnings management. *Accounting Horizon*, 3, 91-102.

Scott, W. R. (2015). *Financial accounting* (7th ed.). USA: Pearson.

Thalita, A. A., Hariadi, B., & Rusydi, M. K. (2022). The effect of earnings management on tax avoidance with political connections as a moderating variable. *Research in Business & Social Science*, 11(5), ISSN: 2147-4478.

Wang, C. L. Y., Wu, L., & Xiao, J. Z. (2016). Political connections and tax-induced earnings management: Evidence from China. *The European Journal of Finance*.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten-year perspective. *The Accounting Review*, 65, 131-156.

Yusnita, H. (2023). The effect of corporate social responsibility on tax avoidance: The moderating role of earnings management. *International Journal of Business and Social Science Research*, 4(10).